BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya setiap manusia itu membutuhkan satu sama lainnya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Dalam Islam kehidupan manusia satu sama lain ini dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalah. Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya, manusia membutuhkan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan kemajuan dalam hidupnya tersebut banyak cara yang dilakukan oleh manusia baik dilakukan secara individu maupun secara berkelompok.

Seperti kegiatan yang dilakukan oleh sebagian warga yang ada di daerah Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Mereka disana melakukan kegiatan secara berkelompok ataupun individu. Karena wilayah Desa tersebut berada di bawah lereng Gunung Lawu, maka mata pencaharian mereka secara umum adalah petani khususnya petani padi. Namun dalam aktivitas tersebut, tidak semua petani di sana memiliki lahan

sendiri sehingga banyak petani yang mengerjakan sawah milik orang lain. Tetapi juga ada yang telah memiliki lahan sendiri, karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, maka untuk menambah penghasilan mereka bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Ada juga yang memiliki lahan namun tidak dapat menggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga penggarapan lahannya diwakilkan kepada orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya.

Selain hal tersebut, sebagian masyarakat Magetan, juga ada yang mengerjakan harta tanah wakaf milik masjid. Dikarenakan tanah wakaf yang diwakafkan pada awalnya hanyalah sebidang tanah pertanian dan tidak terlalu luas ukurannya, maka untuk menghindari agar tanah tersebut tidak mati maka takmir masjid berdasarkan hasil rapat sepakat untuk menyerahkan tanah masjid tersebut untuk digarap dan dikelola. Mengingat kondisi lahan wakaf tersebut tidak luas dan berada di bawah lereng gunung, maka untuk mengelola tanah wakaf masjid tersebut yang cocok adalah dalam bidang pertanian. Berdasarkan keputusan bersama para takmir masjid memberikan peluang pada masyarakat yang bersedia untuk mengelola dan menggarap harta tanah wakaf masjid tersebut. Hasilnya, dalam kegiatan pengelolaan tanah wakaf itu dilakukan oleh seorang petani yang bersedia untuk menggarapnya, tidak berkelompok ataupun oleh badan perwakafan.

Kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik sawah wakaf (nadzir) tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap

petaninya sendiri maupun nadzir. Dalam praktek kerjasama pengelolaan sawah, perjanjian di antara petani dan pemilik tanah/sawah dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Untuk pembagian keuntungan dari hasil pertanian yang diperoleh tersebut dibagi dua (*separo-separo*) antara penggarap dengan masjid dalam hal ini diwakili oleh nadzir, dan digunakan untuk pembangunan masjid. Untuk benih sementara ini ditanggung bersama (petani dan nadzir) namun dalam prakteknya mengenai hal pemberian benih tersebut nadzir memberikannya setelah panen. Dengan kata lain, benih ditanggung sepenuhnya oleh petani dan kemudian setelah panen, nadzir mengganti separo benih tersebut kepada petani.

Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah dimana ia bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Petani ada ikatan secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun. Dalam menjalin hubungan kerjasama haruslah sesuai dengan aturan syariat Islam dimana kegiatan tersebut haruslah baik, merupakan kegiatan saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan jumlah bagian

yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Kegiatan pengelolaan harta wakaf masjid tersebut telah berlangsung selama 5 tahun. Kerjasama tersebut di dalam Islam merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang pada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. Praktek kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah dalam hukum Islam, termasuk dalam katagori *muzâra'ah*. Kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Muzâra'ah merupakan suatu kegiatan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam bidang persawahan atau pertanian dengan perjanjian bagi hasil. Pengertian lain dari *muzâra'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.¹ Pensiari'atan *muzâra'ah* terdapat dalam hadis Nabi SAW:

¹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 115

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (روه البخري و مسلم وأبو داود والنسائي)²

“Bahwa Nabi SAW menyuruh penduduk khaibar untuk menggarap tanah di khaibar dan mereka mendapat setengah dari hasil buminya berupa buah atau hasil pertanian” (muttafaq’Alaih)³

Adapun rukun dan syarat *muzâra’ah* diantaranya orang yang berakad (pemilik tanah dan petani) harus sudah baligh dan berakal, objek *muzâra’ah* meliputi manfaat tanah dan hasil kerja petani, serta ijab qabul. Menyangkut tanah pertanian, tanah yang dapat digunakan adalah tanah yang tidak kering dan memungkinkan untuk digarap dan menghasilkan. Batas-batas tanah itu jelas dan tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Mengenai hasil panen, pembagian hasilnya harus jelas, milik bersama dan telah ditentukan. Jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzâra’ah* mengandung makna akad *ijârah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen.⁴ Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas.

Berlangsungnya kegiatan akad *muzâra’ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini dengan bertemunya nadzir dan petani atau penggarap untuk menentukan pembagian hasil setiap

²Muttafaq ‘Alaih: Shahih Al-Bukhari (v/13, no. 2329), Shahih Muslim (IX/1186, no. 1551), Sunan Abu Dawud (IX/272, no. 3391), Sunan Ibnu Majah (II/824, NO. 2467), Sunan Al-Tirmidzi (II/421, no. 1401).

³Abdul ‘Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajîz Fî Fiqhi al- Sunnah Wa Al-Kitâbi Al ’Azîz Kitâb Al-Thaharah Wa Al-Shalâh*, terj. Team Tashfiyah LIPIA, *Panduan Fiqih Lengkap*, (cet. II; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), h. 582

⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh....*, h. 117

kali panennya. Setelah akad tersebut disepakati maka kegiatan tersebut dapat dilakukan. Menurut ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya perjanjian tersebut, karena yang disepakati dalam hal ini hanyalah bagi hasil yang akan dibagi. Dengan kata lain, pihak yang memiliki lahan (nadzir) dapat menarik kembali lahan wakaf yang telah digarap ataupun dari pihak petani yang sewaktu-waktu mengembalikan lahan tersebut jika ia merasa tidak sanggup lagi untuk menggarapnya. Tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya akad ini akan menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik bagi pemilik lahan ataupun penggarapnya.

Masyarakat di Indonesia khususnya Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan pada umumnya menganut atau mengikuti madzhab Syafi'i. Dimana sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, dalam Islam terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Sedangkan dalam penanganan wakaf para ulama maupun tokoh agama cenderung menggunakan wakaf yang non produktif.

Tradisi mewakafkan tanah untuk masjid telah berlangsung sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan wakaf

disamping berfungsi *ubudiyah* juga berfungsi sosial. Wakaf juga merupakan sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa yang diharapkan dapat memberikan pertolongan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Karena wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama. Selain itu, juga merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan harta yang juga dianjurkan dalam Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.

Wakaf sebagai suatu perbuatan yang bersifat sosial yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pihak yang memerlukan baik untuk kegiatan keagamaan, membantu fakir miskin dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan dan ikrar wakaf. Hal tersebut akan tercapai apabila tanah wakaf tersebut dikelola dengan baik. Karena dalam perwakafan suatu pengelolaan merupakan hal yang sangat penting, dimana suatu harta benda wakaf akan dirasakan manfaatnya apabila harta wakaf tersebut dikelola dengan baik dan produktif.

Benda wakaf yang dapat dikelola dengan baik dan produktif memiliki nilai yang cukup berarti bagi upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk meningkatkan kemanfaatan benda wakaf, tidak bisa tidak, pengelolaannya

harus dijalankan dengan melakukan kegiatan ekonomi. Karena wakaf merupakan bagian dari *Syari'ah Islamiyah*, maka kegiatan ekonomi dalam pengelolaan benda wakaf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam wakaf itu sendiri dan prinsip-prinsip dalam ekonomi Syari'ah.

Pengelolaan benda wakaf produktif dapat dilakukan dengan berbagai akad seperti *al ijârah (operational rent)* yakni dengan perjanjian sewa menyewa), *ijârah al 'amal* yakni dengan perjanjian perburuhan, *al ijârah al muntahiyah bi al tamlik (financial lease with purchase option)* yaitu dengan perjanjian sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atas barang yang disewa, *al murâbahah (deferred payment sale)* yaitu dengan perjanjian jual beli dengan keuntungan yang disepakati, *al mudhârabah (trust financing, trust investment)* yakni dengan perjanjian bagi hasil keuntungan perniagaan, *al musyârahah (partnership, project financing participation)* yakni dengan perjanjian kerjasama dalam persekutuan dagang dan *almuzâra'ah (harvest-yield profit sharing)* yakni dengan perjanjian bagi hasil pertanian.⁵

Selain latar belakang tersebut, peraturan mengenai wakaf ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Karena kegiatan pengelolaan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan telah berlangsung selama 5 tahun maka kegiatan ini ada setelah adanya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun kegiatan pengelolaan tanah wakaf dengan akad *muzâra'ah* pada tanah

⁵Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 6.

wakaf tersebut ada disebabkan karena adanya peraturan Undang-Undang tentang wakaf atau karena inisiatif masyarakat itu sendiri, menurut penulis juga perlu untuk diteliti.

Berdasarkan latar tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“Penerapan Akad Muzâra’ah Pada Tanah Wakaf (Studi Pandangan Tokoh Agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis hanya akan melakukan penelitian dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tentukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *muzâra’ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terhadap penerapan akad *muzâra’ah* pada tanah wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *muzâra’ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

2. Untuk mengetahui pendapat-pendapat tokoh agama di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terhadap penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini melalui dua pandangan diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan secara akademik bagi masyarakat Magetan, penulis dan pembaca mengenai penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf menurut tokoh agama di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan tambahan aplikatif dalam praktik muamalah khususnya tentang penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf menurut tokoh agama di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Serta bagi penulis khususnya sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan secara lebih mendalam mengenai penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan tokoh agama: yang dimaksud tokoh agama adalah orang yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai

agama Islam yang luas, dan dianggap sebagai orang yang mempunyai pengaruh di Desa tersebut. Tokoh agama adalah seseorang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin yang dipilih berdasarkan kontribusi, pengabdian, wawasan ilmu agama Islam yang luas, dan tindakannya diteladani oleh masyarakat.⁶ Sedangkan pandangan tokoh agama adalah pemahaman seseorang terhadap suatu kasus tertentu dalam hal ini adalah penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf. Dimana orang tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman luas tentang hukum Islam dan mempunyai pengaruh ditempatnya. Sampel dalam penelitian yang penulis pilih sebagai tokoh agama adalah ustadz yang dihormati oleh masyarakat serta mempunyai pengaruh di Desa Ngariboyo dimana ustadz yang dipilih oleh penulis adalah ustadz yang telah menempuh pendidikan di pesantren.

2. Akad *Muzâra'ah*: Akad yaitu perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan disertai pernyataan ijab dan qabul. Sedangkan *Muzâra'ah* adalah Kerjasama pertanian antara pemilik dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. *Muzâra'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.⁷

⁶ Amrullah, "Pengertian Tokoh Agama", <http://www.bimbingan.org/2014/08/11/pengertian-tokoh-agama/>, diakses tanggal 12 Desember 2014.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, h.9

Jadi yang dimaksud dalam penerapan akad *muzâra'ah* yaitu praktek atau aplikasi dari sistem perjanjian kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan atau sawah dan penggarap dengan bagi hasil yang disepakati bersama.

3. Tanah Wakaf: Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁸ Dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah pemberian sebagian harta yang dimilikinya untuk diambil manfaatnya bagi umum untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan pengelolaan tanah wakaf adalah pengembangan dan perawatan terhadap manfaat tanah wakaf sesuai tujuan dari wakaf yang dilakukan oleh nadzir.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Muzâra'ah Pada Tanah Wakaf (Studi Pandangan Tokoh Agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan).”

Penulis membagi pembahasan skripsi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang di bahas dalam skripsi ini serta tersusun secara rapi

⁸ Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dan terarah. Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :⁹

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat yang di dapat dari penelitian, definisi operasional.

Bab II. Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yuridis untuk pengkajian dan analisis masalah, dengan isi pembahasan berupa akad *muzâra'ah* dan juga tanah wakaf. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang:UIN Press,2013), h. 28.

Bab III adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV, Hasil penelitian dan analisis, pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga di dapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V yaitu Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.